BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan juga teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi *(Information and Communication Technology atau ICT)* di dunia telah semakin luas. *ICT* ini dipergunakan karena memiliki kelebihan-kelebihan yang menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan cara tradisional dalam melakukan interaksi. Kelebihan dari *ICT* ini yaitu dalam hal kecepatan, kemudahan dan biaya yang lebih murah, sehingga mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengolahan, dan pendayagunaan informasi dalam *volume* yang besar secara cepat dan akurat.

Informasi dan pengetahuan dapat diciptakan secara cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai negara dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara (*mediasi*) apapun.

Kehidupan saat ini teknologi sangat diperlukan untuk menjalankan roda kehidupan dengan berbagai kebutuhan hidup yang dijalankan saat ini. Teknologi yang dibutuhkan bukan hanya untuk mempermudah proses juga untuk mempercepat suatu proses. Perkembangan teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir, kehidupan seperti ini dikenal dengan *e-life*, artinya kehidupan yang sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik, seperti *e-commerce, e-government, e-education, e-library, e-journal, e-medicine, e-laboratory, e-biodiversity,* dan yang lainnya yang berbasis elektronika. Dampak perkembangan teknologinya membuat peran teknologi sangat dibutuhkan untuk keperluan manusia dalam menjalankan kegiatannya.

Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi yaitu mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Kemudian untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi, sarana untuk kerjasama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok yang lain tanpa mengenal batas, jarak, waktu, negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor lainnya yang dapat menghambat bertukar fikiran.

Adanya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah harus dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan yaitu keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui jaringan sistem informasi *online* antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan yang serba cepat dan mudah melalui teknologi digital menjadi suatu tuntutan. Penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan dapat mempermudah akses antara pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat. Tidak hanya melalui komunikasi satu arah saja dimana pemerintah dapat mempublikasikan data dan informasi yang dimilikinya. Akan tetapi juga komunikasi dua arah, yaitu masyarakat dapat menerima dari pemerintah dan memberikan informasi kepada pemerintah. Dengan begitu, adanya transparansi antara pemerintah dengan pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakat dapat terjalin dalam ruang lingkup demokrasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yaitu untuk mewujudkan praktek pemerintahan yang lebih efesien dan efektif.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan *e-government* berdasarkan dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengembangan *Electronik Government*. Kebijakan penerapan *electronic government* (*e-government)* merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI), diiringi semakin meluasnya penggunaan internet sebagai akses ke dunia maya. Perubahan

pemanfaatan teknologi informasi tersebut selain dalam cara berkomunikasi dan menikmati hiburan, juga dalam pemerintahan.

Seiring berjalannya waktu dan banyaknya tuntutan yang dirasa perlu untuk dijawab dengan cara yang efektif, efisien serta akurat, maka dibutuhkan suatu teknologi informasi yang merupakan aspek yang bersifat luwes, fleksibel, terbuka, dan dapat diakses oleh siapapun juga tanpa memandang jarak ruang dan waktu. Dalam kehidupan baik masa sekarang ataupun masa datang, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi telah dan akan menjadi sektor yang dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya, karena teknologi informasi banyak berperan dalam semua bidang.

Perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi dalam sektor pemerintah, mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik. Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung dengan kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya maka dilaksanakan penerapan *e-government* yang akan memadukan subsistem yang tersebar di seluruh daerah dan departemen.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 13 tahun 2003 tentang Unsur Pendukung Menajemen Perkantoran (UPMP), yang menjelaskan agar pemerintah dapat meningkatkan hubungan kerja antar instansi pemerintah

serta dapat menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha secara efektif dan transparan, diperlukan kerangka arsitektur dan *platform* yang kompatibel bagi semua Departemen dan Lembaga Pemerintah, serta penerapan standarisasi bagi beberapa hal yang terkait dengan penggunaan teknologi telematika secara luas. Beberapa yang akan dilaksanakan termasuk pengembangan *e-government* melalui semua instansi pemerintah dan penyediaan layanan masyarakat, memperbaharui kerangka peraturan dan prosedur transaksi di lingkungan pemerintah, serta membangun komitmen dan kesepakatan untuk memperlancar pertukaran dan penggunaan informasi antar instansi pemerintah.

Penerapan *e-government* di berbagai kantor pemerintahan merupakan sebuah langkah yang merupakan pendukung adanya suatu fasilitas yang dapat mempercepat data yang diolah menjadi informasi yang tepat dan akurat. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi yang merupakan salah satu Dinas yang menerapkan *e-government* dengan menggunakan teknologi informasi melalui penggunaan database yang diproses melalui sistem informasi berkinerja. Aplikasi tersebut menangani seluruh aspek detail pelayanan pemberian fasilitas dalam memproses data yang diharapkan akan dapat membantu para pengguna aplikasi dalam mengoperasikannya dengan baik, cepat dan akurat serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berbeda dengan proses pelaporan daerah sebelum menggunakan atau sebelum mengadopsi teknologi informasi yang dirasa pemrosesan data cenderung lebih alot, kurang akurat, serta tentunya memakan biaya serta waktu yang sangat banyak.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2005 tentang organisasi dan tatakerja Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Pusat Statistik Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator penyelenggaraan pendataan dan pelayanan informasi pendidikan secara nasional. Pasal 41 yang menjelaskan bahwa Pusat Statistik Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta statistik pendidikan. Sedangkan pasal 42 disebutkan bahwa Pusat Statistik Pendidikan menyelenggarakan fungsi pengumpulan dan pengelolaan data pendidikan, pelaksanaan penyusunan statistik pendidikan, pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan informasi pendidikan, pengelolaan sistem informasi pendidikan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pengelolaan data dibutuhkan sistem informasi yang memudahkan proses pengelolaan, dalam menjalankan pemerintah pusat yang membuat sistem untuk memudahkan proses pengelolaan data pendidikan. Maka pemerintah pusat yaitu Kemendiknas membuat sistem informasi yang memudahkannya untuk mengetahui data dan informasi pendidikan terbaru yang ada di pemerintah daerah yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.

Sistem aplikasi pangkalan data dan informasi berbasis web atau lebih dikenal dengan istilah Padati Web, merupakan sistem aplikasi pendataan berbasis intranet dan internet yang dirancang untuk mengelola data pendidikan di Kota Cimahi. Padati Web berfungsi sebagai sumber data yang berkualitas untuk mendukung proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi

kebijakan pembangunan pendidikan, Sistem Aplikasi Padati Web ini bertujuan untuk membantu mempermudah proses pemasukan dan pengolahan data dan informasi pendidikan yang ada di Kota Cimahi. Dengan adanya sistem ini maka segala sesuatu hal yang menyangkut kebutuhan data dan informasi mengenai pendidikan di Kota Cimahi antar *user* atau bagian yang satu dengan yang lain dapat dilakukan dengan cepat, tepat, efektif dan akurat.

Sistem Aplikasi Padati Web sangat berguna dalam menangani pendataan pendidikan seperti jumlah sekolah yang ada di Kota Cimahi, jumlah siswa-siswi di Kota Cimahi yang meliputi menurut jenis kelamin dan tingkatan, jumlah kepala sekolah dan guru di Kota Cimahi yang meliputi kepala sekolah/*headmaster* menurut jabatan (terdiri dari guru tetap dan guru tidak tetap), menurut jenis kelamin (terdiri dari laki-laki dan perempuan), guru/*teachers* menurut status kepegawaian (terdiri dari pegawai negeri dan bukan pegawai negeri), pegawai yang ada di Kota Cimahi yang meliputi pegawai menurut jenis pekerjaan (terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga teknis), kelas, ruang kelas yang meliputi menurut status kepemilikan (terdiri dari ruang kelas milik), dan menurut kondisi (terdiri dari baik, rusak ringan, dan rusak berat).

Sistem Aplikasi Padati Web artinya bahwa proses pendataan pendidikan sangat terbantu dengan adanya sistem aplikasi Padati Web. Tingkat kemudahan pengoperasian Padati Web yang sejak awal dirancang agar bisa digunakan oleh berbagai pengguna dengan tingkat penguasaan TIK yang beragam, Padati Web disebutkan memiliki kemudahan yang cukup untuk berbagai kalangan pengguna tersebut.

Sistem Aplikasi Padati Web telah diimplementasi di Kota Cimahi untuk memperoleh gambaran atas keberhasilan dan keefektifan *performance* (pengoperasian) Padati Web dalam mendukung pendataan pendidikan. Padati Web sebagai perangkat lunak pendataan, menunjukkan kondisi yang belum memuaskan. Namun setelah dilakukan penyempurnaan berdasarkan masukan-masukan dari lapangan, sistem aplikasi Padati Web sudah menunjukkan kinerja yang lebih memuaskan dibandingkan sebelumnya, dalam arti meskipun belum pada tahap *'error free'* namun masalah-masalah yang ditemui sebatas masalah teknis yang tidak terlalu signifikan tapi masih memerlukan penanganan yang serius dalam pendataan pendidikan, kemudahan dalam pengoperasian Padati Web khususnya dalam *entry* data serta sistem pelaporan dalam Padati Web.

Proses pengelolaan data sekolah meliputi pengumpulan data sekolah yang didapatkan melalui kuesioner yang disebarkan disetiap sekolah dan data tersebut dikelola oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga lalu di input oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan melalui sistem aplikasi Padati Web. Proses pengelolaan data sekolah ini dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali untuk memperoleh data sekolah yang meliputi jumlah sekolah yang ada di Kota Cimahi, jumlah siswa-siswi di Kota Cimahi yang meliputi menurut jenis kelamin dan tingkatan, jumlah kepala sekolah dan guru di Kota Cimahi yang meliputi kepala sekolah/*headmaster* menurut jabatan (terdiri dari guru tetap dan guru tidak tetap), menurut jenis kelamin (terdiri dari laki-laki dan perempuan), guru/*teachers* menurut status kepegawaian (terdiri dari pegawai negeri dan bukan pegawai negeri), pegawai yang ada di Kota Cimahi yang meliputi pegawai menurut jenis

pekerjaan (terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga teknis), kelas, ruang kelas yang meliputi menurut status kepemilikan (terdiri dari ruang kelas milik), dan menurut kondisi (terdiri dari baik, rusak ringan, dan rusak berat).

Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan data sekolah yang diinginkan oleh Kemendiknas sebagai bentuk pendataan sekolah untuk kerjasamannya bersama BPS (Badan Pusat Statistik). Kemudahan dari setiap fungsi Padati Web, secara umum dinyatakan bahwa Padati Web merupakan aplikasi pendataan pendidikan yang cukup mudah untuk dioperasikan. Untuk pemenuhan kebutuhan data pendidikan, hanya sebagian kecil dari pengelola data pendidikan menyatakan bahwa Padati Web sudah mampu memenuhi kebutuhan laporan data pendidikan, dan sebagian besar mengakui baru sebagian kebutuhan laporan bisa terpenuhi. Kebutuhan disini bisa dalam arti kebutuhan data itu sendiri, atau kebutuhan dalam bentuk format-format pelaporan.

Masalah yang terjadi dalam pendataan ataupun pengelolaan data adalah kurang cepatnya proses pembaharuan data dan informasi pendidikan yang ada di lingkungan Kota Cimahi. Hal ini terjadi akibat adanya kesalahan dalam proses pengumpulan data, terkadang setiap sekolah yang memberikan datanya tidak mengisi lengkap kuesioner sehingga memperlambat proses pembaharuan datanya. Sehingga pelaksanaan proses penerapan kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil, karena permasalahan yang timbul masih kerap saja terjadi, diantaranya belum optimalnya SDM dalam proses pendataan, dan kurangnya pemahaman proses Padati Web.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut: ”Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Pangkalan Data Dan Informasi Berbasis Web (Padati Web) Di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memfokuskan arah dan proses pembahasan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Communication* dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi?
2. Bagaimana *Resources* dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi?
3. Bagaimana *Dispositions* dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi?
4. Bagaimana *Bureaucratic Structure* dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pedidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi, sedangkan tujuan yang dicapai dalam penulisan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui *Communication* dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui *Resources* dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui *Dispositions* dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.
4. Untuk mengetahui *Bureaucratic Structure* dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan bagi peneliti, dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan terutama mengenai pengelolaan data dan informasi pendidikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.
2. Kegunaan teoritis, hasil dari penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan yang relevan mengenai sistem aplikasi Padati Web sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya *e-government*.
3. Kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi mengenai pengelolaan data pendidikan yang diaplikasikan melalui sistem aplikasi Padati Web.

1.5 Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan sesuai dengan fokus penelitian, maka pada bagian ini peneliti akan menjelaskan berbagai kerangka teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi sebagai berikut:

> "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan" (Wahab, 2001:65).

Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan/merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.

Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah (Islamy, 1995:14).

Sejalan dengan pendapat Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul *Analisis kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.*

> "Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan" (Wahab, 2001:3).

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan . M.Irfan Islamy juga mengemukakan pengertian kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Kebijakan adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah (Islamy, 1995:14).

Implementasi kebijakan merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Edward III dalam bukunya yang berjudul

"*Implementing public policy"* menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut:

> "*Policy implementation as we have seen,is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an excutive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects*" (Edward, 1980:1).

Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan, atau keluarnya standard peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

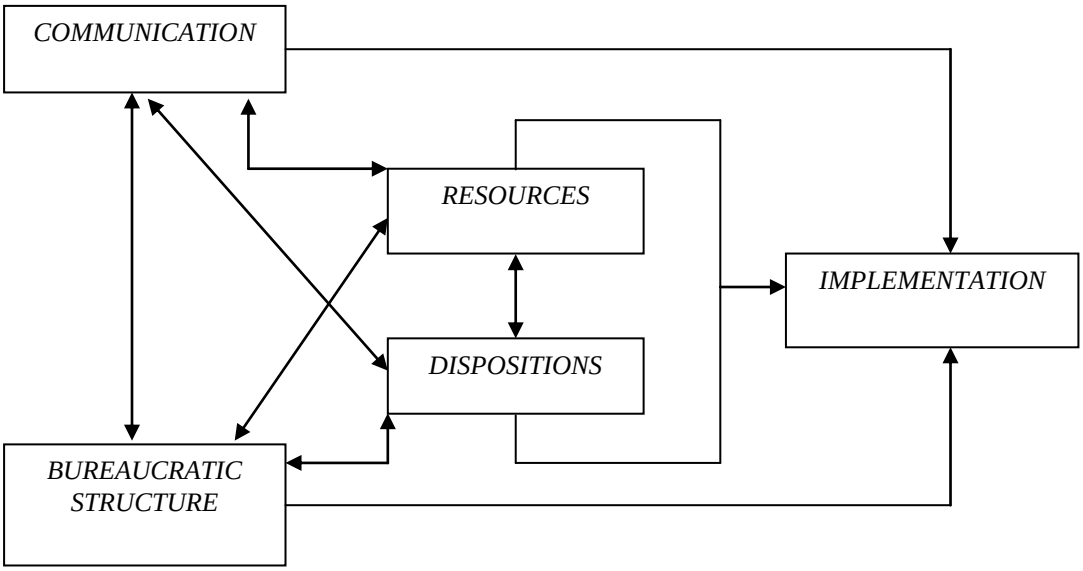
Berdasarkan penjelasan diatas bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahap pembuatan keputusan yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan. Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi adalah:

> "*Communications, resources, dispositions, and bureaucratic structure influence implementation indirectly as well as directly, through their interaction with each other*" (Edward,1980:147).

Komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan stuktur birokrasi yang mempengaruhi proses implementasi secara langsung maupun tidak langsung, melalui interaksinya satu sama lain. Model implementasi kebijakan menurut Edward III di atas jelas bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi, yaitu *Communication*, *Resources*, *Dispositions*, dan *Bureaucratic Structure*. Masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lainnya, kemudian secara bersama-sama mempengaruhi terhadap implementasi. Secara

lebih rinci model implementasi kebijakan menurut Edward III bisa dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.1
Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Menurut Edward III



Sumber : Edward III (1980:148)

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Edward III dalam buku *Implementing Public Policy* dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor diatas, adapun keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu: ***Kesatu*** *Communication* menurut Edward III adalah:

> *"The first requirement for effective policy implementation is that those who are implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decisions and implementation orders must be transmitted to appropriate personal before they can be followed. Naturally, these communications need to be accurate, and they must be accurately perceived by implementors. many obstacles lie in the path of transmission of implementation communications"* (Edward III, 1980:17).

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka harus mengimplementasikan suatu keputusan mesti tahu apa yang mereka harus kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi meski di transmisikan

kepada personalia yang tepat sebelum bias diikuti. Secara alami, komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi mesti secara akurat pula diterima oleh para implementor.

Berdasarkan penjelasan diatas Komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Komunikasi dalam implementasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Dalam menjalankan sebuah kebijakan maka dengan terpenuhinya ketiga faktor pendukung komunikasi maka akan tercapainya sebuah implementasi kebijakan yang baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Faktor ***Kedua*** *Resources* dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut menurut Edward III adalah:

> *"Resources can be a critical factor in implementing public policy. Important resouces include staff of sufficient size and with the proper skills to carry out their assignments and the information, authority, and facilities necessary to translate proposals on paper into functioning public service*" (Edward III, 1980:53).

Sumber daya bisa menjadi suatu faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya penting meliputi staf dengan jumlah yang cukup dengan keterampilan yang tepat untuk melakukan tugasnya serta informasinya, otoritas, dan fasilitas yang perlu untuk menterjemahkan proposal pada makalah ke dalam pemberian pelayanan publik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka faktor-faktor pendukung sumber daya menjadi bagian penting apabila suatu implementasi ingin tercapai dengan maksimal. Hal tersebut sangat ditentukan oleh kelengkapan dari sumber daya yang menunjang akan pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, kewenangan yang dimiliki, sumber daya informasi dan teknologi, serta kelengkapan sarana dan prasarana dapat menjadi factor dari sumber daya yang sangat menentukan terhadap keberhasilan suatu implementasi kebijakan, terlebih jaitannya dengan proses peningkatan kualitas dalam melaksanakan pelayanan publik yang prima terhadap masyarakat.

Faktor ***Ketiga*** *Dispositions* dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III adalah:

> *"The dispositions or attiudes of implementation is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. most implementors can exercise considerable discretion in the implementation of policies. one of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. another reason is the complexity of the policies themselves. the way in which implementors exercise their direction, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. Their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies effecting their organizational and personal interests"* (Edward III, 1980:89).

Dispositions atau Disposisi merupakan sikap pelaksanaan dari pelaksana implementasi kebijakan, jika para pelaksana bersikan baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapkannya. Sebaliknya jika

perspektif dan tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan. Kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam mendukung *Dispositions* dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalakan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan publik yang baik. Yang menjadi indikator dalam disposisi yaitu *Effects Of Dispositions* dan *Incentives.*

Faktor ***Keempat*** dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III *Bureaucratic Structure* adalah:

> *"Policy implementors may know what to do and have sufficient desire and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve. two prominent characteristics of bureaucracies are standard operating prosedurs (SOP) and fragmentation. the former develop as internal respons to the limited time and resources of implementors and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia"* (Edward III, 1980:125).

Para implementor kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumberdaya yang cukup untuk melakukannya, namun mereka mungkin masih dicegah di dalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka layani. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah prosedur pengoperasian standar (*Standard Operating Procedure*s/SOP) dan fragmentasi.

berkembang sebagai respon-respon internal pada waktu dan sumber implementasi terbatas dan keinginan atas keseragaman di dalam operasi organisasi kompleks dan organisasi yang tersebar secara luas; mereka seringkali tetap efektif disebabkan oleh kurangnya aktivitas birokrasi".

Bureaucratic structure adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. *Bureaucratic structure* juga merupakan sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi dan adanya *standard operating pricedures (SOP)* standar operasi prosedur dalam rutinitas sehari-hari dalam menjalankan implementasi kebijakan.

Birokrasi secara pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyebaran tanggung jawab (*Fragmentation*) atas kebijakan yang ditetapkan. Pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan yang cukup dan sumber daya untuk melakukannya, tapi mereka mungkin masih terhambat di implementasi oleh struktur organisasi di mana mereka melayani. Dua karakteristik utama birokrasi adalah prosedur pengoperasi standar (SOP) dan fragmentasi, yang pertama dikembangan sebagai respon internal untuk waktu yang terbatas dan sumber daya pelaksana dan keinginan

untuk keseragaman dalam pengoperasian kompleks dan tersebar luas organisasi, mereka sering tetap berlaku karena inersia birokrasi.

Berdasarkan penjelasan mengenai struktur birokrasi di atas, *Bureaucratic Structure* yang mendukung dalam suksesnya sebuah implementasi kebijakan harus adanya prosedur tetap bagi pelaku dalam melaksanakan kebijakan dan adanya jawab dalam menjalankan sebuah kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Pengertian *Standard Operating Prosedures* (SOP) menurut Edward III adalah:

> "*Standard Operating Prosedures (SOP) are routines that enable public officials to make numerous everyday decisions. Whether we are discussing police on the beat making rapid decisions about whether a person is dangerous or a Social Security Administration caseworker deciding on the eligibility of a person for benefits, we find that SOP are commonly employed. The reason SOP are widely used and the effets of SOP on policy implementation are examined in this section*" (Edward III, 1980:125).

Prosedur pengoperasian standar (SOP) adalah rutin yang memungkinkan para pejabat publik untuk membuat berbagai keputusan setiap hari. Apakah publik membicarakan kepolisian dalam patroli membuat keputusan cepat mengenai apakah seseorang berbahaya atau pekerja insidental (*caseworker*) Administrasi Jaminan Sosial memutuskan tentang kecakupan seseorang karena keuntungannya, ditemukan bahwa SOP ini umumnya digunakan. Alasan SOP banyak digunakan dan efek SOP dalam implementasi kebijakan diuji di dalam bagian ini.

Berdasarkan pengertian diatas SOP merupakan bagaimana seseorang untuk membuat sesuatu keputusan tertentu dengan cepat dan tepat. Proses implementasi kebijakan atau SOP dibutuhkan guna mencapai apa yang menjadi

tujuan suatu organisasi. SOP yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi memberikan suatu infomasi kepada aparatur dalam mengetahui informasi tentang Padati Web.

Pengertian *Fragmentation* menurut Edward III adalah: "*Fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units*" (Edward III, 1980:134). Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasional. Berdasarkan pengertian tersebut, fragmentasi merupakan suatu tanggung jawab para aparatur dalam melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi.

Kebijakan penerapan *e-government* bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk merealisasikan suatu tujuan dalam penerapan *e-government* untuk mengembangkan pemerintahan yang berbasis elektronik. Bank Dunia (*World Bank*) mengemukan *e-Government* sebagai:

> *"E-Government refers to the use by govermnent agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens businesses,and other arms of goverment"*(*e-Government* dijadikan acuan yang digunakan dalam sistem informasi pemerintahan (seperti dalam *Wide Area Networks*, *internet*, dan komunikasi berjalan) yang memiliki kemampuan untuk menjembatani hubungan dengan warga negara lainya, para pebisnis dan berbagai elemen pemerintahan lainnya) (Bank dunia dalam Indrajit, 2005: 3).

Dengan demikian implementasi kebijakan *e-government* tersebut mempunyai kontribusi yang baik bagi pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat yang lebih cepat, efektif dan efesien dan lebih meningkatkan kinerja aparatur supaya lebih baik. Implementasi

kebijakan penerapan *e-government* terdapat indikator-indikator yang penting, berkaitan dengan berbagai infrastruktur serta strategi pendukungnya, yaitu meliputi:

1. Data infrastruktur, meliputi manajemen sistem, dokumentasi, dan proses kerja di tempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data yang berfungsi mendukung penerapan *e-government.*
2. Infrastruktur legal, hukum dan peraturan termasuk berbagai perizinan untuk mendukung menuju *e-government*.
3. Infrastruktur institusional, diwujudkan dengan institusi pemerintah secara sadar dan eksis melakukan dan memfokuskan tujuannya dalam penerapan *e-government.*
4. Infrastruktur manusia, sumber daya manusia yang handal merupakan hal pokok yang harus dipersiapkan dalam penerapan *e-government*.
5. Infrastuktur teknologi, penerapan *e-government* banyak bertumpu
6. pada adanya infrastruktur teknologi yang memadai.
7. Strategi pemikiran dan kepemimpinan, penerapan *e-government* sangat membutuhkan pemimpin yang membawa visi *e-government* dalam agendanya dan memiliki strategi pemikiran untuk mewujudkannya. (Indrajit, 2002:25).

Sistem merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerjasama untuk mencapai beberapa tujuan. Sistem atau pendekatan sistem minimal harus mempunyai empat komponen, yakni masukan, pengolahan, keluaran dan balikan atau kontrol. Sementara Mc Leod mendefinisikan :

> "Sistem sebagai kelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama dalam mencapai tujuan akan tetapi secara umum proses yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuannya adalah dengan mengubah sumber daya input menjadi sumber daya output" (Mc Leod, 1995:14-18).

Menurut definisi tersebut sistem merupakan kelompok yang memiliki tujuan yang sama dalam mencapai tujuan dengan proses organisasi yang dapat mengubah sumber daya yang ada, sedangkan pengertian data dalam bukunya yang berjudul *Sistem: Informasi Konsep Dasar, Analisis Desain dan Implementasi*, menurut Wahyono yaitu: "Bahan baku informasi, didefinisikan sebagai kelompok

teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda dan sebagainya". (Wahyono,2004:2). Sedangkan definisi informasi yang dikemukakan oleh Wahyono, yaitu:

> "Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan" (Wahyono,2004:3).

Suatu informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya, dan suatu informasi mengambarkan kejadian-kejadian nyata yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan. Pengolahan data secara elektronik merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi dengan menggunakan komputer yang mencakup pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan dan pengawasan hasil pengolahan tersebut. Informasi berkualitas harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Akurat artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda dan apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka dianggap data tersebut dianggap.
b. Tepat waktu artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi.
c. Relevan artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan, kalau kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi di berbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut.
d. Lengkap artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan.
   (Mc Leod,2001:61).

Informasi yang berkualitas seperti yang dikemukakan di atas harus mempunyai empat ciri yang pertama yaitu suatu informasi harus akurat, akuratnya informasi karena telah melakukan pengujian dan apabila pengujian tersebut berhasil maka informasi tersebut dianggap data. Kedua suatu informasi harus tepat waktu, karena suatu informasi harus ada jika informasi tersebut diperlukan. Ketiga suatu informasi harus relevan, karena suatu informasi yang diberikan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan yang keempat, adalah suatu informasi haruslah lengkap tidak boleh kurang, jika informasi tersebut kurang maka suatu informasi masih diragukan. Setelah menguraikan tentang sistem, data dan informasi di atas, maka sistem informasi dapat disimpulkan menurut Kadir dalam bukunya yang berjudul *Pengenalan Sistem Informasi*, yaitu :

> "Sistem informasi mencakup sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi informasi dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses (data menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan" (Kadir,2003:10).

Definisi diatas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem informasi adalah sejumlah komponen yang saling berhubungan antara manusia, komputer, teknologi informasi dan prosedur kerja, dan diproses data menjadi informasi dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan. Sistem informasi juga digunakan untuk mendukung didalam pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian dan untuk memberikan gambaran efektivitas dalam suatu perusahaan.

Sistem informasi merupakan bagian dari hasil pengolahan data yang lebih berguna bagi penerimanya. Pengolahan data secara elektronik merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi dengan

menggunakan komputer yang mencakup pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, dan pengawasan hasil pengolahan tersebut.

Dalam suatu organisasi pemerintahan, baik instasi kota maupun provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu melibatkan kerja sama antar orang, selalu diperlukan manajemen. Hal ini melandasi pemikiran manusia bahwa manajemen merupakan sesuatu hal yang penting untuk di pelajari dan dikembangkan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintah memungkinkan departemen-departemen untuk mengintegrasikan informasinya. Ketika pemerintah menyadari bahwa informasi yang dikumpulkan merupakan aset yang berharga, pemerintah dapat menggunakannya secara komersial dan mengubahnya menjadi komoditas yang bisa ditukar. Kasus ini, *Information, Comunication, and Technology* (ICT) berfungsi sebagai medium untuk mentransfer informasi dari sumbernya ke pengguna atau ke pasar.

Aplikasi Padati Web yang ada pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi merupakan aplikasi yang dirancang agar efektifitas kerja pegawai dapat ditingkatkan, karena beberapa modul didalamnya memungkinkan terciptanya kemudahan bagi para pegawai kantor tersebut dalam melakukan tugas kerjanya.

Dapat disimpulkan bahwa jika organisasi pemerintahan, ditata dengan benar dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip organisasi modern, yaitu mempunyai visi dan misi dengan jelas, maka akan dapat mempermudah kinerja aparatur pemerintahan. Keadaan seperti

ini tentunya akan menciptakan pemerintahan yang responsibilitas, responsivitas, dan akuntabilitas sehingga dapat mewujudkan *good governance*.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti menyusun definisi operasional sebagai berikut:

1. Sistem Informasi adalah komponen-komponen yang saling berhubungan antara manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja, dan diproses data menjadi informasi dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan.
2. Sistem Aplikasi Padati Web adalah sistem pengolahan data dan informasi data pendidikan yang mekanismenya dilakukan melalui sarana jaringan komputer lokal. Aplikasi ini dirancang sebagai cara agar segala kegiatan/pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dapat efektif dan efisien.
3. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparatur dalam mengaplikasikan sistem aplikasi Padati Web untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam mengelola data dan informasi mengenai data pendidikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.
4. Kebijakan adalah aturan yang dibuat oleh aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dalam penggunaan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.
5. Implementasi Kebijakan adalah tindakan aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dalam mengelola data pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.

6. Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kota Cimahi adalah proses pelaksanaan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kota Cimahi dalam melaksanakan pengelolaan data pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web. Dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan Aplikasi Padati Web Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kota Cimahi dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut:
    1) *Communication* adalah proses penyampaian informasi data pendidikan yang dilakukan oleh aparatur kepada aparatur lainnya mengenai data pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi. Komunikasi meliputi:
        a. *Transmission* adalah penyampaian informasi data pendidikan oleh aparatur mengenai kebijakan publik tentang pengolahan data pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.
        b. *Clarity* adalah kejelasan Sistem Aplikasi Padati Web berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam menginformasikan data pendidikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.
        c. *Consistency* adalah konsistensi dari penyampaian informasi data pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web oleh Aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.

2) *Resources* adalah sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan untuk melakukan pengelolaan data pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi. Sumberdaya ini meliputi:
   a. *Staff* adalah aparatur yang memiliki kewenangan dalam mengelola dan menginformasikan data pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi .
   b. *Information* adalah teknologi informasi yang mendukung proses pengelolaan data pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.
   d. *Authority* adalah kewenangan aparatur dalam implementasi kebijakan mengenai pengelolaan data pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.
   e. *Facilities* adalah sarana dan prasarana yang mendukung proses pengelolaan data pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi
3) *Dispositions* adalah sikap dari aparatur pelaksana kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan dan menginformasikan data pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padat Web pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi. *Dispositions* ini meliputi :
   a. *Effects Of Dispositions* adalah sikap aparatur terhadap proses mengelola dan menginformasikan data pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.

b. *Incentives* adalah imbalan untuk aparatur dalam mengelola data dan informasi pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.

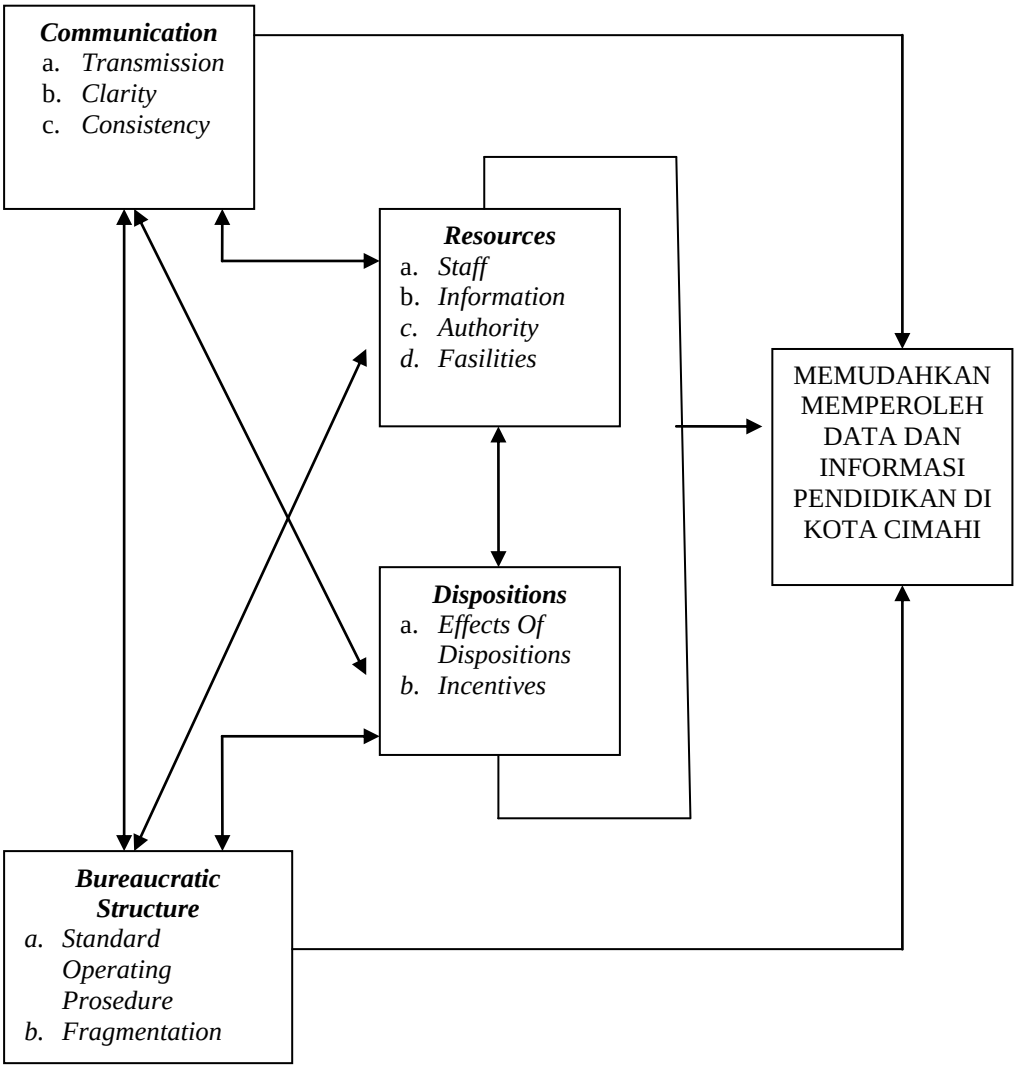
4) *Bureaucratic Structure* adalah struktur organisasi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi yang mengelola data dan informasi data pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi. *Bureaucratic Structure* ini meliputi :

a. *Standard Operating Prosedures* (SOP) adalah mekanisme, sistem dan prosedur implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padatiweb dalam mengelola data dan informasi pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.

b. *Fragmentation* adalah Pembagian tanggung jawab kepada aparatur dalam pengelolaan data dan informasi pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.

Berdasarkan teori dan indikator-indikatornya diatas, maka peneliti membuat model kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.2
Model Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian berguna untuk mengemukakan tata kerja dalam suatu kegiatan penelitian. Penelitian ini berdasarkan suatu metode. Metode tersebut dapat mengarahkan penyusunan dalam melakukan penelitian dan pengamatan, dengan begitu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Dikutip dari Mohammad Nazir dalam bukunya *Metode Penelitian Sosial* yang mendefinisikan metode deskriptif, sebagai berikut:

> "Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kasus peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki" (Nazir, 1998:63).

Berdasarkan pengertian di atas, metode penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Hal yang sama dikemukakan oleh pendapat Ronny Kountur dalam bukunya *Metode Penelitian* mendefinisikan metode penelitian deskriptif, yaitu:

> "Metode penelitian deskriptif *(descriptive research)* adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti" (Kountur, 2004:105).

Berdasarkan metode yang digunakan, penyusun menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berupa gambaran dari jawaban informan. Adapun pengertian metode kualitatif menurut Sugiyono dalam bukunya *Memahami Penelitian Kualitatif* mendefinisikan pengertian kualitatif, sebagai berikut:

> "Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya yaitu eksperimen) dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*" (Sugiyono, 2005:1).

Dengan mencermati definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang memberikan gambaran dan uraian yang jelas, sistematis, faktual dan akurat dalam sebuah penelitian serta peneliti merupakan instrumen kunci dalam sebuah penelitian yang mengutamakan kualitas data, artinya data yang

disajikan dalam bentuk kata atau kalimat (tidak menggunakan analisis statistika). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui:

1. Studi Lapangan, yaitu dengan mengamati dan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui tentang studi lapangan ini terdiri dari:
   a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan nara sumber yang mengetahui dan memahami lebih jauh khususnya mengenai Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.
   b. Observasi, yaitu cara menghimpun data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan observasi non partisipan dimana peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh yang di observasi, peneliti hanya mengamati tentang pelaksanaan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi tepatnya Sub Bagian Program dan Pelaporan. Peneliti ingin mengetahui kebenaran pandangan teoritis tentang masalah yang diselidiki dalam hubungannya dengan dunia nyata. Observasi juga untuk

memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya.

c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Sistem Aplikasi Padati Web. Metode ini dimaksudkan untuk mempelajari dan mengkaji secara mendalam data-data mengenai penyajian data dan informasi pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.

2. Studi Pustaka, yaitu dengan membaca dan mencari buku-buku, majalah, dan surat kabar, pencatatan dokumen, ataupun modul-modul mengenai data pendidikan.

1.6.2 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Purposive* menurut James A. Black teknik Purposive yaitu:

> "Salah satu cara yang diambil peneliti untuk memastikan, bahwa unsur tertentu dimasukan ke dalam sampel. Tingginya tingkat selektivitas yang ada pada teknik ini akan menjamin semua tingkatan yang relevan direpresentasikan dalam rancangan penelitian tertentu" (Black,1999:264).

Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Peneliti mengambil beberapa orang aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang dianggap memiliki cukup informasi tentang Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi. Adapun informan yang

merupakan aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi yang rencananya akan dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, karena beliau yang mengetahui dan menginfomasikan data pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.
2. Staf bagian Program dan Pelaporan, karena beliau yang mengelola dan menginfomasikan data pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang sesuai dengan penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Secara operasional teknis analis data yang dilakukan melalui beberapa tahapan model teknik analisis data. Penelitian kualitatif ini merupakan penyelidikan dalam mendekati suatu suasana tanpa menggunakan hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya, karena muncul dari pengalaman kerja lapangan dan berakar dalam data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan laporan ini ada tiga teknik, dikutip dari Sugiyono dengan bukunya *Memahami Penelitian Kualitatif,* ketiga teknik tersebut sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu bagian dari proses analisia dengan bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat disimpulkan.
2. *Data Display* (penyajian data), yaitu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
3. *Conclusion Verification* (penarikan kesimpulan), yaitu suatu kesimpulan yang diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan

lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat. (Sugiyono,2007:92-99).

Pengertian analisis data tersebut merupakan aplikasi data mengenai aplikasi Padati Web yang harus dianalisis setelah dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan.

1.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi yang diambil sebagai tempat penelitian adalah di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Cimahi yang beralamat di Jln. R.H. Demang Harjakusumah, komplek perkantoran Pemda Kota Cimahi. Adapun Jadwal Penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2011	2011								2012	
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst s/d des	Jan	Feb
1	Observasi awal											
2	Pengajuan judul U.P											
3	Penyusunan U.P											
4	Seminar U.P											
5	Pengajuan surat ijin											
6	Pelaksanaan observasi											
7	Pengumpulan Data											
	Observasi											
	Wawancara											
	Dokumentasi											
8	Pengolahan dan analisis data											
9	Bimbingan skripsi											
10	Penulisan skripsi											
11	Sidang skripsi											